



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA
MUKOMUKO KELAS II
TAHUN 2023**

Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota
Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
Website : www.pa-mukomuko.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini di samping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan, laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Kami berupaya menyajikan laporan secara objektif, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Namun, kami meyakini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak terkait, guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan kinerja kami.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Mukomuko dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini.

Mukomuko, 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko,



Budi Hari Prosetia, S.H.I
NIP. 197808172007041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah di kerjakan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

Dalam Laporan ini dapat dilihat target, sasaran dan capaian yang telah di dapat di

tahun 2023. Di awal tahun 2023, Program Kerja yang dibuat berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah di tetapkan dari Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Grand Design Reformasi Birokrasi serta Cetak Biru 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara Keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko mencapai 102,47 % dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	99%	99,5%	100,5%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,5%	101,53%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	99,75%	101,78%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	96,25%	98,21%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I					100,5%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%

	penyelesaian perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	60%	65%	108,3%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2					104,15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3					100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4					105,26%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023					102,47%

Keberhasilan penanganan perkara juga selurus dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat atau pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Hal ini dapat dilihat dari Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2023 yang mencapai 102.47%. Kemudian dari segi Pengelolaan Anggaran, Secara Keseluruhan Anggarn sudah dipergunakan secara baik, efektif, dan efisien. Serta penggunaan anggaran tahun 2023 sudah tepat sasaran.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	8
1.2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.4. ISU STRATEGIS	6
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 2020-2024	9
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	14
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	Error! Bookmark not defined.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
3.3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	85
BAB IV PENUTUP	91
4.1. KESIMPULAN.....	91
4.2. REKOMENDASI	91

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024 DAN 2025
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023 DAN 2024
5. SERTIFIKAT PENGHARGAAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....6



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023	3
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko	10
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023	14
Tabel 4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023	22
Tabel 5 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	31
Tabel 6 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	32
Tabel 7 Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023	33
Tabel 8 Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023	33
Tabel 9 Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu selama beberapa tahun sebelumnya	34
Tabel 10 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	34
Tabel 11 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	35
Tabel 12 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
Tabel 13 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023.....	37
Tabel 14 Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023	38
Tabel 15 Data Jenis Perkara PA Mukomuko Tahun 2023.....	38
Tabel 16 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	39
Tabel 17 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	40
Tabel 18 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	40
Tabel 19 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
Tabel 20 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023.....	42
Tabel 21 Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023	43
Tabel 22 Data Jenis Perkara PA Mukomuko Tahun 2023.....	43
Tabel 23 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	44
Tabel 24 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	45
Tabel 25 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	45
Tabel 26 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 27 Persentase Karakteristik Responden yang dominan mengisi survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Mukomuko	48
Tabel 28 Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko	48
Tabel 29 Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023.....	49
Tabel 30 Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko	50

Tabel 31 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	51
Tabel 32 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	51
Tabel 33 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko.....	52
Tabel 34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
Tabel 34 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	54
Tabel 35 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023	56
Tabel 36 Kinerja Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2023	56
Tabel 37 Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu.....	57
Tabel 38 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	57
Tabel 39 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	58
Tabel 40 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
Tabel 41 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023	60
Tabel 42 Kinerja Perkara Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023.....	60
Tabel 43 Capaian Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	61
Tabel 44 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	62
Tabel 45 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	63
Tabel 46 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
Tabel 47 Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan...	65
Tabel 48 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023	66
Tabel 49 Kinerja Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2023.....	67
Tabel 50 Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	67
Tabel 51 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	68
Tabel 52 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	68
Tabel 53 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
Tabel 54 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023	71
Tabel 55 Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2023.....	71
Tabel 56 Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	72
Tabel 57 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	72
Tabel 58 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	73
Tabel 59 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
Tabel 60 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023	75
Tabel 61 Kinerja Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023	76
Tabel 62 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	77
Tabel 63 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	77
Tabel 64 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	78
Tabel 65 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79

Tabel 66 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.....	80
Tabel 67 Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023	81
Tabel 68 Kinerja Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2023.....	81
Tabel 69 Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).....	82
Tabel 70 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	83
Tabel 71 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	83
Tabel 72 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
Tabel 73 Anggaran dan keterkaitan dengan pencapaian sasaran strategis.....	86
Tabel 74 Kinerja Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi tahun 2023.....	87
Tabel 75 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2021-2023	87
Tabel 76 Realisasi DIPA 04 Tahun 2023	89
Tabel 77 Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023	89
Tabel 78 Laporan Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2023	89
Tabel 79 Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Tahun 2023.....	90
Tabel 80 Laporan Keuangan Panjar Perkara Tahun 2023	90



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	30
Grafik 2 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	31
Grafik 3 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu selama beberapa tahun sebelumnya.....	34
Grafik 4 Capaian Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	39
Grafik 5 Capaian Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	44
Grafik 6 Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko	50
Grafik 7 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	55
Grafik 8 Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	57
Grafik 9 Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	62
Grafik 10 Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	65
Grafik 11 Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	68
Grafik 12 Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	72
Grafik 13 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	72
Grafik 14 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	80
Grafik 15 Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	83
Grafik 16 Rata-Rata Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2021-2023	87

BAB I

PENDAHULUAN



I.1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Mukomuko adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencakup pada arah kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, guna memenuhi harapan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Pengadilan Agama Mukomuko berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi sebagai wujud pertanggungjawaban yang sistematis dan terukur dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Mukomuko ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan Agama pada tahun mendatang.

I.2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama Mukomuko secara organisasi, administrasi dan finansial serta teknis yustisia, berada di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU no 4 tahun 2014 tentang kekuasaan kehakiman juncto Kepres nomor 21 Tahun 2004 tentang pengadilan, organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan, yang meliputi Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai Talak, Itsbat Nikah, Cerai Gugat, Izin Poligami, Hak Bekas Istri, Harta Bersama, Asal-usul Anak, Dispensasi Nikah, Pembatalan Nikah, Penguasaan Anak, Pengesahan Anak, Pencegahan Nikah, Nafkah Anak Oleh Ibu, Ganti Rugi Terhadap Wali, Penolakan, Kawin Campur, Pencabutan Kekuasaan Wali, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali.
- b) Waris yang meliputi Gugat Waris dan Penetapan Ahli Waris.
- c) Ekonomi Syariah
- d) Infak
- e) Hibah
- f) Wakaf

- g) Wasiat
- h) Zakat
- i) Shadaqoh

Sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, memiliki fungsi yaitu:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito, tabungan dan sebagainya.

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, bahwa susunan organisasi Pengadilan Agama Kelas II terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas :

- a) Panitera Muda Permohonan;
- b) Panitera Muda Gugatan; dan
- c) Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas :

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c) Subbagian Umum dan Keuangan.

Masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a) Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Manna Kelas II dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b) Wakil Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II.

- c) Hakim

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama serta menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta melaksanakan pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua.

- d) Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara,
- Penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

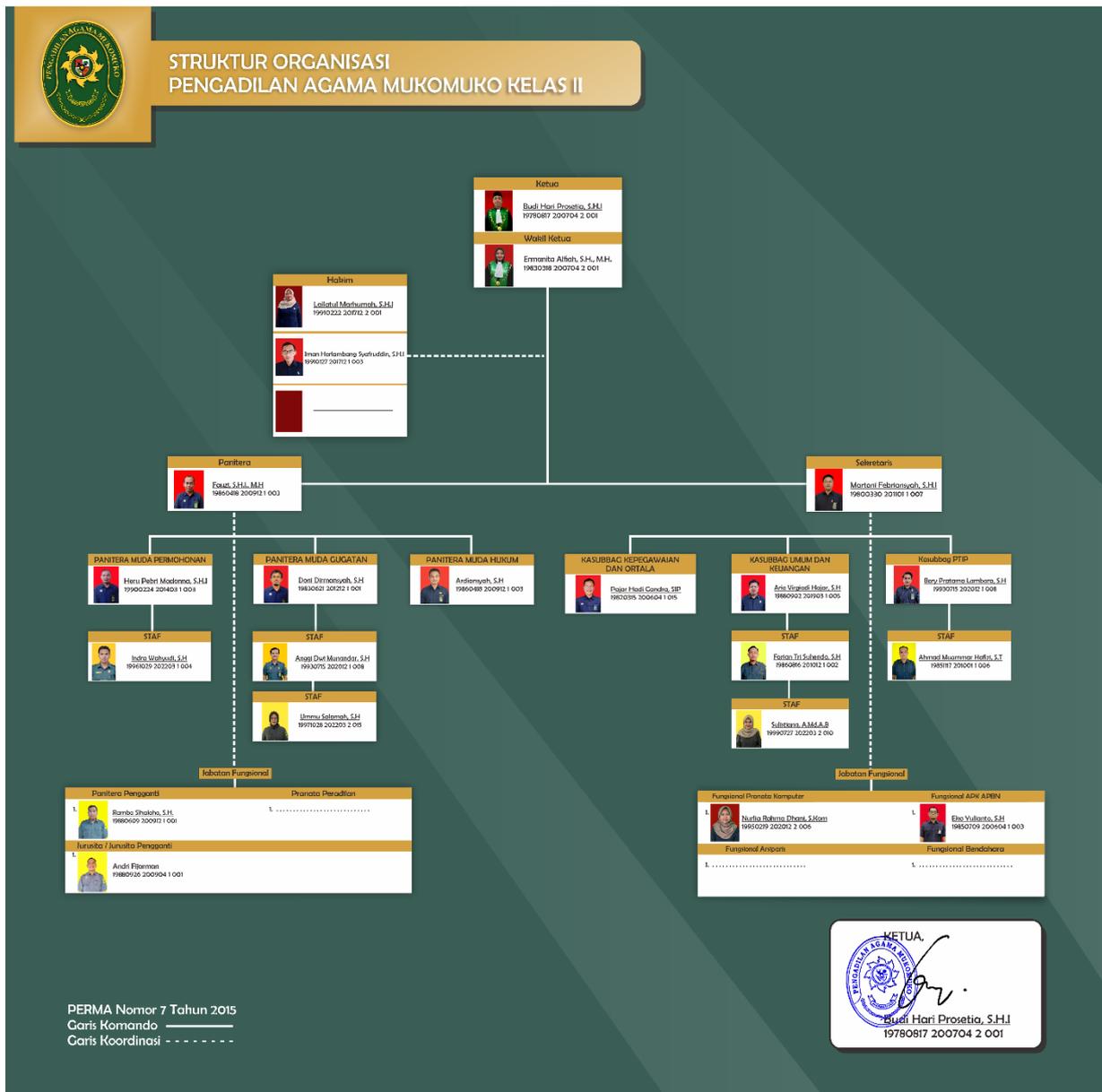
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

e) Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Gambar I Struktur Organisasi



1.4. ISU STRATEGIS

Secara garis besar, permasalahan utama pada Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan sehingga masih terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian administrasi peradilan tersebut;
- 2) Kurangnya tenaga pegawai baik Hakim, maupun bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga penyelesaian pekerjaan sedikit terhambat;
- 3) Masih terdapat kekurangan anggaran pada beberapa mata anggaran tertentu sehingga hasil dari realisasi anggaran tersebut kurang memadai; dan

- 4) Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor masih sangat terbatas seperti perangkat komputer, rumah dinas dan kendaraan dinas serta alat pengolahan data sehingga perlu diupayakan pengadaannya.

I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut dibandingkan dengan penetapan kerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pengadilan. Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Manna adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada BAB ini diuraikan mengenai Perencanaan Strategis, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan serta Rencana Kinerja Pengadilan Mukomuko Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub BAB ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub BAB ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja .

BAB IV PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya; dan
3. Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima oleh Satker).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 2020-2024

A. VISI

Visi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG"

Pernyataan visi Pengadilan Agama Mukomuko tersebut mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota dan kabupaten.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris), Hakim, Panitera Muda, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

B. MISI

Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.
- 2) Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern.
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

C. TUJUAN DAN STRATEGIS

1) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan Misi Pengadilan Agama Mukomuko, adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

2) Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- b) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; dan
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

3) Program Utama dan Kegiatan

Pengadilan Agama Mukomuko melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementean/Lembaga. Adapun pengukuran kinerja menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko. Berikut ini rincian Indikator Kinerja Utama tersebut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
I.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan secara tepat waktu terhadap jumlah perkara yang diselesaikan turun berjalan

		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Jumlah Putusan Perkara
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Jumlah Putusan Perkara
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perhitungan index kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayan Publik
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu terhadap Jumlah Putusan

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi terhadap Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yangh diselesaikan terhadap Jumlah Perkara Prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan terhadap jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum terhadap Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Perbandingan Putusan Perkara yang ditindaklanjuti terhadap Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi tolak ukur keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Pengadilan Agama Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu untuk mewujudkan kinerja

tersebut maka disusun program utama dan kegiatan Pengadilan Agama Mukomuko.

Program utama merupakan program yang menggambarkan tentang hal utama (*core business*) yang akan diwujudkan oleh Pengadilan Agama. Sementara untuk mewujudkan *core business* tersebut maka dilaksanakan kegiatan sebagai upaya perwujudannya.

Mengacu pada program utama dan kegiatan Mahkamah Agung, berikut ini program dan kegiatan Pengadilan Agama Mukomuko :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Demi terwujudnya program ini maka dilaksanakan kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama. Indikator kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama adalah :

- Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan.
- Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.
- Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- Jam layanan posbakum pada peradilan agama.
- Administrasi perkara perdata di lingkungan peradilan agama.
- Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 3 bulan.
- Pedoman tata kelola di lingkungan peradilan agama.
- Tenaga teknis peradilan agama yang berkompeten di bidang administrasi peradilan.
- Pengadilan agama yang meningkat dalam pelayanan publik.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja utama Pengadilan Agama Mukomuko. Demi terwujudnya program ini maka dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adapun indikator kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah :

- Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan.
 - Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
 - Laporan kegiatan biro keuangan.
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Program ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja utama Pengadilan Agama Mukomuko. Demi terwujudnya program ini maka dilaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung. Adapun indikator kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung adalah :
- Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung.
 - Pengadaan Sertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan.
 - Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan turunan atau pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA). Jika RENSTRA berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, maka RKT orientasi waktunya per tahun/tahunan. Secara garis besar Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2023 seperti tersaji pada tabel di bawah ini (versi lengkap lihat pada lampiran).

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	60%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun pada awal tahun dan dimungkinkan terjadi perubahan dalam tahun berjalan jika terjadi perubahan capaian kinerja atau anggaran dalam DIPA. Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023 sebagai berikut.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hari Prosetia, S.H.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

Mukomuko, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Budi Hari Prosetia, S.H.I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%

Kegiatan	Anggaran	
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	2.862.478.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	15.336.611.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	78.800.000,-



Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

Mukomuko, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Budi Hari Prosetia, S.H.I

Pada tanggal 5 Juli 2023 Pengadilan Agama Mukomuko melakukan perubahan (revisi) target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hari Prosetia, S.H.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mukomuko, 05 Juli 2023

Pihak Pertama,

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II



Budi Hari Prosetia, S.H.I

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu



Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	60%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	2.862.478.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	15.336.611.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	78.800.000,-

Mukomuko, 05 Juli 2023

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu



Dr. Abd. Hakim, M.H.I.



Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II



Budi Hari Prosetia, S.H.I.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Manna Tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan target pencapaian indicator sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
I	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	99%	99,5%	100,5%

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,5%	101,53%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	99,75%	101,78%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%	96,25%	98,21%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I					100,5%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	60%	65%	108,3%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2					104,15%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3					100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	105,26%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4					105,26%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023					102,47%

Catatan : Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Rata-rata Capaian Kinerja = $\frac{\text{Capaian SS1} + \text{Capaian SS2} + \text{Capaian SS3} + \text{Capaian SS4}}{4}$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **Capaian Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 adalah sebesar : 102,47%**

Pada tahun sebelumnya 2022 capaian kinerja sebesar 101,02% artinya terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,45% dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik I
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun Sebelumnya



3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian kinerja diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko Tahun 2023 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN I :
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

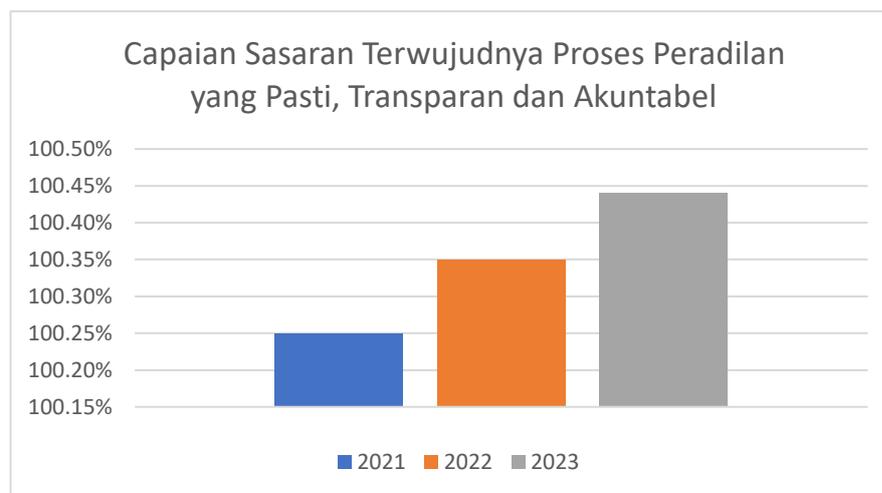
Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko dengan mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi serta kepuasan Peradilan Tingkat Pertama dan Masyarakat Terhadap Layanan yang diberikan Peradilan Tingkat Banding. Pada sasaran ini terdapat 4 indikator kinerja yang diukur.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,5%
2	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100,6%	100,6%	101,53%
3	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100,00%	100,0%	101,78%
4	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100,00%	100,0%	98,21%
Rata-Rata Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		100,25%	100,35%	100,5%

Grafik 2
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Data pada tabel 5 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terpenuhi dengan nilai yang baik.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko selalu berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian hukum, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, walaupun pada beberapa indikator kinerja masih belum mampu untuk mempertahankan atau mencapai capaian target sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dikarenakan adanya kendala baik teknis maupun non teknis.

Analisis terhadap keempat indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

I. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus di tahun berjalan) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Pokok-pokok surat edaran ini diantaranya mengatur mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Sedangkan data perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian dari Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 6

Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	99,5%	99%	100,5%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, realisasi dapat mencapai yang ditentukan dengan capaian kinerja sebesar 100,5%.

Apabila dilihat secara keseluruhan, semua perkara yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 413 perkara, sebanyak 400 perkara telah berhasil diputus dan sebanyak 398 perkara telah berhasil diputus tepat waktu pada tahun berjalan. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023

No.	Bulan	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa
Sisa Perkara Tahun 2022				1
1	Januari 2023	32	20	
2	Februari 2023	67	61	
3	Maret 2023	26	37	
4	April 2023	7	13	
5	Mei 2023	42	18	
6	Juni 2023	56	58	
7	Juli 2023	33	37	
8	Agustus 2023	43	43	
9	September 2023	30	28	
10	Oktober 2023	30	31	
11	November 2023	29	28	
12	Desember 2023	18	26	14
TOTAL		414	400	14

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Tabel 8
Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus Tepat Waktu	Sisa
1	Cerai Talak	78	72	6
2	Cerai Gugat	216	210	6
3	Dispenpasi Kawin	53	53	0
4	Isbat Nikah	60	60	0
5	Permohonan Penetapan Ahli Waris	2	2	0
6	Wali Adhal	1	1	0
8	Permohonan Wali	1	0	0
9	Harta Bersama	2	0	2
TOTAL		413	398	14

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

- b) Perbandingan antar target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Adapun capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 9
Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu selama beberapa tahun sebelumnya

Tahun	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Perkara Selesai Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
2023	400	398	99,5%	99%	100,5%
2022	462	462	100%	100%	100%
2021	505	503	99,6%	100%	99,6%

Grafik 3
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu selama beberapa tahun sebelumnya



- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	100%	100%	100,5%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel II
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	100,5%
2	Capaian PTA Bengkulu	100%
3	Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	99,05%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko lebih tinggi dari Capaian PTA Bengkulu dan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.

e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil antara lain:

- Pembinaan dan pengawasan melekat dari pimpinan yakni ketua dan wakil ketua;
- Komitmen bersama pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko mukomuko beserta jajarannya untuk peningkatan mutu kinerja dan pelayanan melalui penandatanganan pakta integritas pada tanggal 3 Januari 2023;
- Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan Agama Mukomuko karena seluruh hakim telah mengikuti diklat teknis hakim;

Hal-hal tersebut berpengaruh secara langsung terhadap penyelesaian perkara yang tepat waktu sepanjang tahun 2023.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah majelis	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Realisasi Biaya Perkara	Capaian Realisasi Biaya Perkara	Capaian Perkara diselesaikan tepat waktu
2023	2	Rp. 323.778.500,-	Rp. 322.180.000,-	99,50%	100,5%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase penyelesaian perkara Tepat Waktu lebih tinggi dari capaian kinerja realisasi Biaya Perkara sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator penyelesaian perkara yang tepat waktu :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap triwulan, dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dengan tujuan mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target yang telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat kendala segera dapat dicarikan solusi terbaik.
- 2) Program penegakan pelayanan hukum yang terdapat pada anggaran DIPA 04 telah terealisasi 100% sehingga Pelayanan Hukum Optimal ;

- 3) Program dukungan manajemen yang terdapat pada anggaran DIPA 01 telah terealisasi 67,67% yang berisi kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah membantu Hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara yang tepat waktu, beberapa kegiatan tersebut diantaranya :
 - Pemeliharaan alat pengolah data secara rutin;
 - Pemeliharaan Gedung kantor secara rutin seperti ruang sidang, ruang hakim dan kepaniteraan dan jaringan internet;
 - Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu;
 - Tersedianya rumah dinas bagi hakim, dan masih banyak lainnya.
- 4) Bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Mukomuko Sebagai *supporting unit* internal berkomitmen secara penuh terhadap dukungan terhadap sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi pada Pengadilan Agama Mukomuko.

2. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dihitung dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Indikator ini merupakan salah satu tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Agama Mukomuko selaku tingkat pertama, dan capaiannya sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 13
Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	99,5%	98%	101,53%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 101,53%.

Tabel 14
Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Banding	Jumlah Tidak Mengajukan Banding
1	Januari 2023	20	2	18
2	Februari 2023	61	0	61
3	Maret 2023	37	0	37
4	April 2023	13	0	13
5	Mei 2023	18	0	18
6	Juni 2023	58	0	58
7	Juli 2023	37	0	37
8	Agustus 2023	43	0	43
9	September 2023	28	0	28
10	Oktober 2023	31	0	31
11	November 2023	28	0	28
12	Desember 2023	26	0	26
TOTAL		400	2	398

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas, jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah 398 perkara.

Tabel 15
Data Jenis Perkara PA Mukomuko Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Perkara Putus	Perkara Diajukan Banding	Persentase
1	Cerai Talak	72	0	0
2	Cerai Gugat	211	2	0,5%
3	Dispenpasi Kawin	53	0	0
4	Isbat Nikah	60	0	0

5	Permohonan Penetapan Ahli Waris	2	0	0
6	Wali Adhal	1	0	0
8	Permohonan Wali	1	0	0
9	Harta Bersama	0	0	0
TOTAL		400	2	0,5%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator Persentase Perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Mukomuko adalah 0.5%, sehingga persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 99.5%.

b) Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 16
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Perkara yang Tidak Mengajukan Banding	Realisasi	Target	Capaian
2023	400	398	99,5%	98%	101,53%
2022	458	455	99,34%	99%	100,34%
2021	505	503	99,6%	100%	99,6%

Grafik 4
Capaian Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	100%	100,34%	101,53%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	99%	99%	99%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	101,53%
2	Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI)	193,95%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pengadilan Agama Mukomuko lebih rendah dari Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022.

- e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ini berhasil dicapai antara lain :

- Sebagian besar pencari keadilan merasa puas atas putusan atas putusan tingkat pertama;
- Kinerja Majelis Hakim atau Hakim Tunggal dalam memutuskan perkara yang Tepat Waktu dan Akuntabel; dan
- Produk Hukum yang diberikan kepada para pihak secara transparan.

- f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut :

Tabel 19
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah majelis	Anggaran DIPA 01 + DIPA 04	Realisasi Anggaran (Terkait IKU)	Perkara Putus	Capaian Perkara Tidak Mengajukan Banding
2023	2	Rp. 18.020.897.000,-	83,835%	400	101,53%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Banding lebih tinggi dari capaian kinerja realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator

penyelesaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap triwulan, dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dengan tujuan mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target yang telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat kendala segera dapat dicarikan solusi terbaik;
- 2) Program penegakan pelayanan hukum yang terdapat pada anggaran DIPA 04 telah terealisasi 100% sehingga Pelayanan Hukum Optimal;
- 3) Tingkat Keberhasilan Mediasi;
- 4) Kepatuhan melaksanakan putusan secara sukarela; dan
- 5) Pelayanan masyarakat melalui aplikasi *e-court*.

3. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Indikator ini merupakan salah satu tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Agama Mukomuko selaku tingkat pertama, dan capaiannya sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 20
Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	99,75%	98%	101,78%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 101,78%.

Tabel 21
Kinerja Penyelesaian Perkara PA Mukomuko Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Kasasi	Jumlah Tidak Mengajukan Kasasi
1	Januari 2023	20	0	20
2	Februari 2023	61	1	60
3	Maret 2023	37	0	37
4	April 2023	13	0	13
5	Mei 2023	18	0	18
6	Juni 2023	58	0	58
7	Juli 2023	37	0	37
8	Agustus 2023	43	0	43
9	September 2023	28	0	28
10	Oktober 2023	31	0	31
11	November 2023	28	0	28
12	Desember 2023	26	0	24
TOTAL		400	1	399

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas, jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah 399 perkara.

Tabel 22
Data Jenis Perkara PA Mukomuko Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Perkara Putus	Perkara Diajukan Kasasi	Persentase
1	Cerai Talak	72	0	0
2	Cerai Gugat	211	1	0,25%
3	Dispenpasi Kawin	53	0	0
4	Isbat Nikah	60	0	0

5	Permohonan Penetapan Ahli Waris	2	0	0
6	Wali Adhal	1	0	0
8	Permohonan Wali	1	0	0
9	Harta Bersama	0	0	0
TOTAL		400	1	0,25%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator Persentase Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Mukomuko adalah 0.25%, sehingga persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 99.75%.

b) Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 23
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi	Target	Capaian
2023	400	399	99,75%	98%	101,78%
2022	458	458	100%	99%	100,56%
2021	505	505	100%	100%	100%

Grafik 5
Capaian Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 24
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	100%	100,56%	101,78%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 25
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	101,78%
2	Capaian PTA Bengkulu Tahun 2022	101,45%
3	Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	53,83%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Agama Mukomuko lebih tinggi dari Capaian PTA Bengkulu dan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022.

e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ini berhasil dicapai antara lain :

- Pembinaan dan pengawasan melekat dari pimpinan yakni ketua dan wakil ketua;
- Komitmen bersama pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko mukomuko beserta jajarannya untuk peningkatan mutu kinerja dan pelayanan melalui penandatanganan pakta integritas pada tanggal 3 Januari 2023;
- Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko karena seluruh hakim telah mengikuti diklat teknis hakim; dan
- Pembuatan putusan berkualitas;

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut :

Tabel 26
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah majelis	Anggaran DIPA 01 + DIPA 04	Realisasi Anggaran (Terkait IKU)	Perkara Putus	Capaian Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
2023	2	Rp. 18.020.897.000,-	83,835%	400	101,78%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi lebih tinggi dari capaian kinerja realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator penyelesaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :
- 1) Tingkat Keberhasilan Mediasi;
 - 2) Kepatuhan melaksanakan putusan secara sukarela; dan
 - 3) Pelayanan masyarakat melalui aplikasi *e-court*.

4. PERSENTASE INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah index kepuasan pencari keadilan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dimana Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80 .

Indikator ini merupakan salah satu tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Agama Mukomuko selaku tingkat pertama. Index kepuasan pencari keadilan pada Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2023 ini didapatkan dari hasil Survey kepuasan masyarakat yang dilakukan sebanyak 4 kali setiap triwulan sekali dengan responden yaitu Para Pencari Keadilan, Masyarakat Umum yang mencari informasi dan para tamu yang datang langsung ke ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Mukomuko.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

- 1) **Prosedur Pelayanan Jelas**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) **Prosedur Pelayanan Mudah Dipahami**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan sehingga mudah dipahami;

- 3) **Informasi Pelayanan Jelas**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 4) **Waktu Penyelesaian**, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 5) **Waktu Pelayanan Jam Kerja**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan dalam rentang jam kerja;
- 6) **Kesopanan dan Keramahan Petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 7) **Keahlian Petugas**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan;
- 8) **Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan**, yaitu alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik;
- 9) **Fasilitas Pengaduan Mudah Diakses**, yaitu alat penunjang pengaduan di dalam pelayanan public terdapat pada tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Tabel 27

Persentase Karakteristik Responden yang dominan mengisi survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Mukomuko

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1	Jenis Pelayanan	Informasi Perkara Sidang	80%
2	Jenis Kelamin	Perempuan	64%
3	Pendidikan Terakhir	S-I	12%
4	Pekerjaan	PNS	30%
5	Suku Bangsa	Indonesia	100%

Tabel 28

Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko Setiap Triwulan Tahun 2023

Triwulan	Nilai rata-rata tertimbang SKM	Nilai Konversi IKM (Realisasi)
I	3,89	3,92
II	3,90	3,882
III	3,65	3,711
IV	3,90	3,889
Rata-rata	3,84	3,85

Hasil perhitungan rata-rata survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2023 didapatkan nilai rata-rata tertimbang Survei Kepuasan Masyarakat adalah 3,84 atau konversi IKM sebesar 3,85. mempunyai kategori, dengan mutu pelayanan level Baik.

Berikut pembahasan lebih lanjut capaian Kinerja Indikator kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Agama Mukomuko, khususnya di triwulan ke-4 sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 29

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023
Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko

Tahun	Nilai rata-rata tertimbang SKM	Nilai Konversi IKM (Realisasi)	Realisasi	Target	Capaian
2023	3.84	3.85	96,25%	98%	98,21%

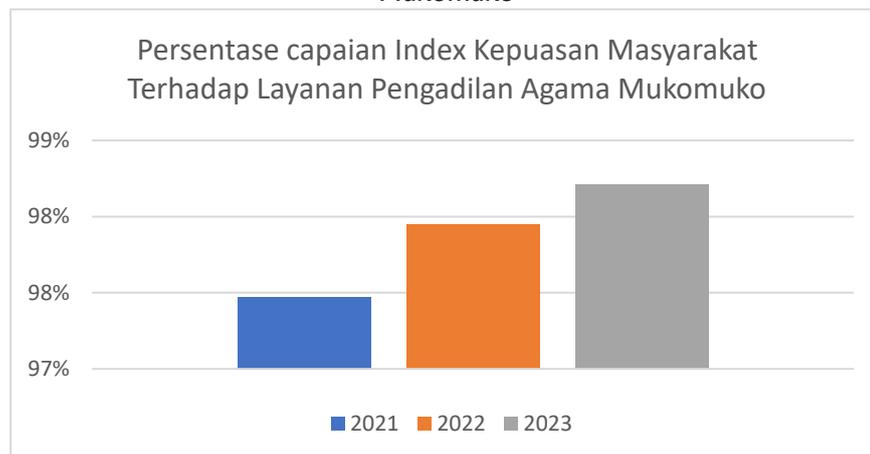
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, realisasi dapat melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 98,21%.

- b) Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 30
Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko

Tahun	Target	(Realisasi)	Capaian
2023	98%	96,25%	98,21%
2022	98%	96%	97,95%
2021	99%	96,50%	97,47%

Grafik 6
Capaian Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 31
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	97,47%	97,95%	98,21%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	90%	95%	95%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari Target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 32
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	98,21%
2	Capaian PTA Bengkulu Tahun 2022	100%
3	Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	114,30%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Agama Mukomuko lebih rendah dari Capaian PTA Bengkulu dan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022.

- e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 33
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Prosedur pelayanan jelas	3.30	Baik
2	Prosedur pelayanan mudah dipenuhi	3.18	Baik
3	Informasi tentang biaya pelayanan dapat diketahui dengan jelas	3.10	Baik
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3.10	Baik
5	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja	3.75	Sangat Baik
6	Pelayanan petugas cepat, tanggap dan ramah	3.57	Baik
7	Petugas memiliki keahlian yang memadai	3.48	Baik
8	Sarana dan prasarana pendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai	3.25	Baik
9	Fasilitas pengaduan jelas dan mudah diakses	3.80	Sangat Baik
Rata-Rata Tertimbang		3.85	Baik

Berdasarkan rata-rata hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat tahun 2023 menunjukkan bahwa dari ke-9 unsur pelayanan sudah baik dengan nilai paling tinggi adalah pada Pengadilan Agama Mukomuko mendapat nilai paling tinggi yaitu Fasilitas pengaduan jelas dan mudah diakses dengan skala 3.80, karena mudah diakses dan cepat ditanggapi. Unsur dengan nilai paling rendah yang dapat dijadikan prioritas peningkatan yaitu Informasi tentang biaya pelayanan dapat diketahui dengan jelas dengan nilai paling rendah yaitu 3,10 namun sudah masuk kategori mutu pelayanan baik Namun Pengadilan Agama Mukomuko tetap berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan baik kepada pencari keadilan dan memberikan akses informasi sebesar besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut :

Tabel 34
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	SDM	Capaian Realisasi Anggaran (DIPA 01+DIPA 04)	Capaian Index Persepsi Kepuasan
2023	Majelis 2majelis Jurusita/Jurusita Pengganti I Orang Petugas PTSP 4 Orang	83,835 %	98,21 %

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan di Pengadilan Agama Mukomuko lebih tinggi dari capaian kinerja realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan, yaitu :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap triwulan, dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dengan tujuan mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target yang telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat kendala segera dapat dicarikan solusi terbaik
- 2) Program penegakan pelayanan hukum yang terdapat pada anggaran DIPA 04 telah terealisasi 100% sehingga Pelayanan Hukum Optimal;

- 3) Pelatihan pelayanan prima dengan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Mukomuko;
- 4) Diklat ditempat kerja untuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko; dan
- 5) Monitoring dan Evaluasi mingguan.

**SASARAN 2 :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

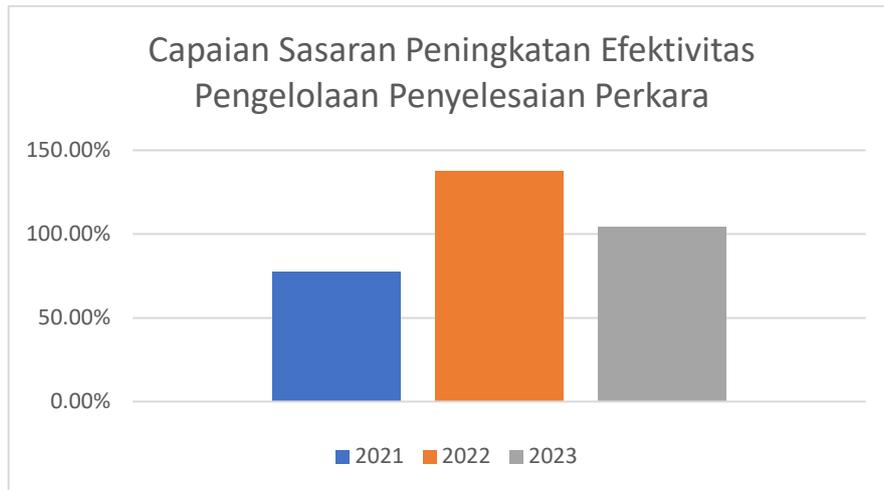
- 1) Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Adapun Capaian Sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 34
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	55,56%	175%	108,3%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		77,78%	137,5%	104,15%

Grafik 7
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Berdasarkan Tabel 34 dan Grafik 7 di atas terlihat pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, yakni sebesar 77,78% menjadi 137,5%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, yakni dari 137,5% menjadi 104,15%.

5. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} = 100\%$$

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan, untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Adapun capaian kinerja untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 35
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu, realisasi dapat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 36
Kinerja Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Salinan Putusan yang Disediakan	Persentase Capaian
1	Januari 2023	20	20	100%
2	Februari 2023	61	61	100%
3	Maret 2023	37	37	100%
4	April 2023	13	13	100%
5	Mei 2023	18	18	100%
6	Juni 2023	58	58	100%
7	Juli 2023	37	37	100%
8	Agustus 2023	43	43	100%
9	September 2023	28	28	100%
10	Oktober 2023	31	31	100%
11	November 2023	28	28	100%
12	Desember 2023	26	26	100%
TOTAL		400	400	100%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas terlihat bahwa setiap bulan, Putusan yang disampaikan kepada para pihak selalu tepat waktu.

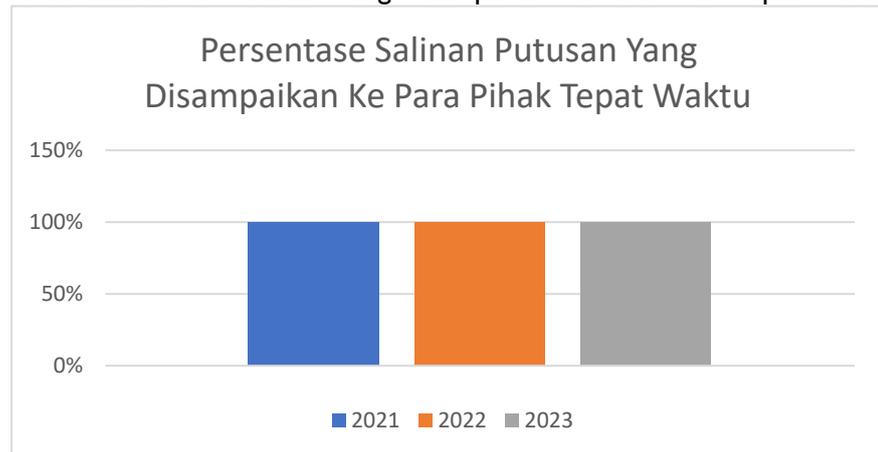
- b) Perbandingan antar target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Adapun capaian indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 37
Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah Salinan putusan yang disediakan	Realisasi	Target	Capaian
2023	400	400	100%	100%	100%
2022	462	462	100%	100%	100%
2021	505	505	100%	100%	100%

Grafik 8
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu



Adapun capaian indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir terlihat bahwa capaiannya selalu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mukomuko terus-menerus mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dan berorientasi pada pelayanan prima sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 38
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Salinan Putusan Yang	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023

	Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			
1	Realisasi Kinerja	100%	100%	100%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko pada Tahun 2023 sama dengan dari target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 39

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	100%
2	Capaian PTA Bengkulu	100%
3	Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	326,70%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko sama dengan Capaian PTA Bengkulu dan lebih rendah dari Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.

- e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil antara lain:

- Salinan Putusan yang dibuat oleh Hakim tepat waktu (*one day one publish*); dan
- Pelayanan pada PTSP Pengadilan Agama Manna melayani dengan cepat dan tanggap.

- f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 40
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah Panitera Pengganti	Jumlah Biaya Proses	Realisasi Biaya Proses	Capaian Salinan Putusan yang disampaikan
2023	I	Rp. 327.643.500,-	90,94%	100,5%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu lebih tinggi dari capaian kinerja realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap triwulan, dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dengan tujuan mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target yang telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat kendala segera dapat dicarikan solusi terbaik.
- 2) Pengawasan melekat kepada seluruh petugas pelayanan untuk menyampaikan Salinan putusan tepat waktu;
- 3) Pada tahun anggaran 2023 ini Pengadilan Agama Mukomuko mendapatkan bantuan sewa mesin fotocopy dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehingga menunjang kinerja penyediaan Salinan Putusan agar selalu dapat disampaikan ke para pihak tepat waktu; dan
- 4) Pemberitahuan segera melalui aplikasi SMS notifikasi putusan.

6. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} = 100\%$$

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.

Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.

Adapun Analisa capaian Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 41
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	65%	60%	108,3%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi, realisasi dapat telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 108,3%.

Tabel 42
Kinerja Perkara Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI				Realisasi penyelesaian perkara melalui mediasi
			Mediasi Berhasil Sebagian	Berhasil Dengan Pencabutan	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	Total selesai melalui Mediasi	
1	Januari	2	-	-	-	0	0,00%
2	Februari	4	-	3	-	3	75,00%

3	Maret	3	1	1	-	2	67,00%
4	April	1	-	-	-	-	0,00%
5	Mei	2	-	-	-	0	0,00%
6	Juni	5	2	1	-	3	62,00%
7	Juli	5	1	-	-	1	20,00%
8	Agustus	6	1	-	-	1	16,67%
9	September	3	-	-	-	0	0,00%
10	Oktober	6	-	1	-	1	16,67%
11	November	4	1	1	-	2	50,00%
12	Desember	4	-	-	-	0	0,00%
TOTAL		45	6	7	-	13	43,90%
Rata-rata		4,60	0,35	0,70	0	1	43,90%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi adalah 43,90%.

- b) Perbandingan antar target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

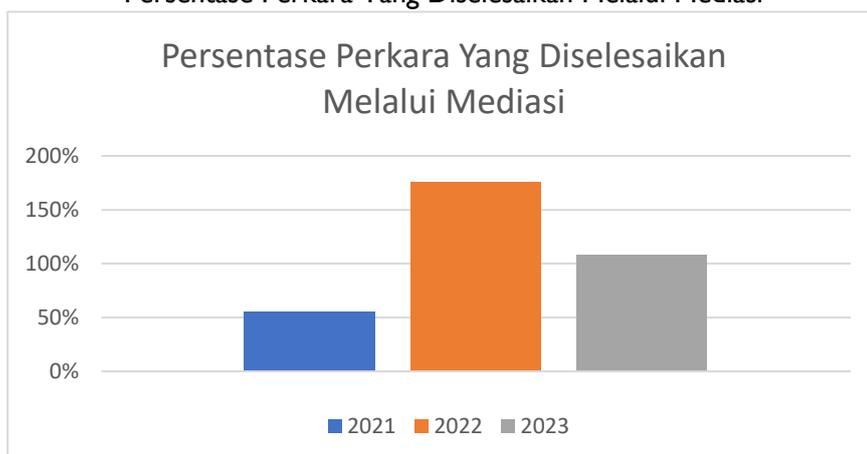
Adapun capaian indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 43

Capaian Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Realisasi	Target	Capaian
2023	35	23	65%	60%	108,3%
2022	57	12	21%	12%	175,4%
2021	36	2	5,56%	10%	55,56%

Grafik 9
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi mengalami penurunan pada tahun 2023, dikarenakan pada tahun 2022 target realisasi terlalu kecil dan tidak dilakukan revisi target sehingga capaian sangat jauh melebihi target. Pada tahun 2023 dilakukan revisi target kinerja pada penyelesaian mediasi yang semula 2% menjadi 60% sehingga capaian tidak jauh dari target.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 44
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	55,56%	175,4%	108,3%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	10%	12%	60%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 45
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	108,3%
2	Capaian standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	76,29%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko lebih tinggi dari Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.

e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Manna ini berhasil dicapai antara lain :

- Jumlah Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Mukomuko sudah memadai yakni berjumlah 4 orang Mediator dari Hakim dan 1 orang Mediator Non Hakim;
- Kompetensi Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim seluruhnya telah bersertifikat, sehingga hasil mediasinya maksimal.
- Setiap Triwulan mediator non hakim dievaluasi oleh unsur Pimpinan.

f) Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 46
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah Mediator	Jumlah Panjar Biaya Perkara	Realisasi Biaya Perkara	Capaian Perkara diselesaikan melalui Mediasi
2023	5	Rp. 323.778.500,-	99,50%	108,3%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi lebih tinggi dari capaian kinerja realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap triwulan, dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dengan tujuan mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target yang telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat kendala segera dapat dicarikan solusi terbaik.
- 2) Keberhasilan mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan;
- 3) Beberapa hakim mediator telah bersertifikasi; dan
- 4) Bekerjasama dengan Mediator Non-Hakim dari Unsur Profesional.

**SASARAN 3 :
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan" merupakan sasaran yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Mukomuko . Dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan

terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

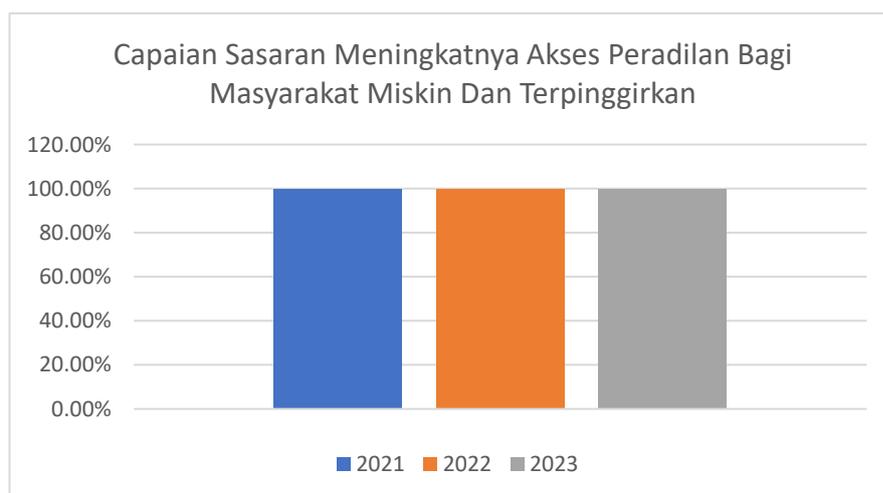
- 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan.
- 3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Adapun Capaian Sasaran strategis " Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan" tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 47
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

No.	Indikator	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan		100%	100%	100%

Grafik 10
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan



Berdasarkan Tabel 47 dan Grafik 10 di atas terlihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2023 capaiannya memiliki besaran yang sama, yaitu 100%.

7. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} = 100\%$$

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara.

Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Layanan prodeo ini dapat diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Mendapatkan anggaran prodeo/ pembebasan biaya perkara sebesar Rp 13.500.000- (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan target perkara yaitu 20 Perkara. Adapun capaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 48
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan, realisasi dapat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 49
Kinerja Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2023

No.	Bulan	Target Volume Perkara Prodeo pada RKAKL	Jumlah Perkara Prodeo yang diajukan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Persentase Capaian
1	Januari	3	3	3	100%
2	Februari	3	2	2	100%
3	Maret	3	3	3	100%
4	April	3	4	4	100%
5	Mei	3	4	4	100%
6	Juni	3	2	2	100%
7	Juli	2	2	2	100%
TOTAL		20	20	20	100%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas Capaian Perkara Prodeo yang diselesaikan sampai bulan Juli 2023 mencapai 100%.

- b) Perbandingan antar target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Adapun capaian indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 50
Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2023	20	20	100%	100%	100%
2022	20	20	100%	100%	100%
2021	6	6	100%	100%	100%

Grafik 11
Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Adapun capaian indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir terlihat bahwa capaiannya selalu 100%.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 51
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	100%	100%	100%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 sama dengan dari target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 52
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	100%
2	Capaian Standar Nasional (Ditjen Badilag) Tahun 2022	144,94%

3	Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	333,33%
----------	---	---------

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Pengadilan Agama Mukomuko lebih rendah dari Capaian Standar Nasional (Ditjen Badilag) tahun 2022 dan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.

e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan ini berhasil dicapai antara lain :

- Perkara Prodeo yang diterima sesuai dengan prosedur dan syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan;
- Adanya sosialisasi kepada publik yang membutuhkan menyangkut program perkara prodeo; dan
- Adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan terkait anggaran dan administrasi perkara.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Perkara Prodeo Yang Diselesaikan di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 53
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah SDM	Anggaran Prodeo	Realisasi Anggaran Prodeo	Capaian Realisasi Anggaran Prodeo	Capaian Perkara Prodeo Diselesaikan
2023	Hakim 4 Orang PP I Orang JS I Orang	Rp. 13.500.00,-	Rp. 13.500.00,-	100%	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara Prodeo Diselesaikan sama dengan capaian kinerja realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan :

- 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan tujuan program memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan golongan tertentu di Kabupaten Mukomuko dan berdampak pada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peradilan agama; dan
- 2) Kegiatan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tujuan membantu masyarakat pencari keadilan golongan tertentu di kabupaten Mukomuko;

8. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN

Indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} = 100\%$$

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Mendapatkan anggaran sidang di luar gedung pengadilan/sidang keliling sebesar Rp 35.300.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan target perkara yaitu 24 Perkara.

Adapun capaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 54
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan, realisasi dapat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 55
Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Perkara diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Persentase Capaian
1	Januari	-	-	-
2	Februari	6	6	100%
3	Maret	7	7	100%
4	April	6	6	100%
5	Mei	3	3	100%
6	Juni	3	3	100%
TOTAL		24	24	100%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas Capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan sampai bulan Juni 2023 mencapai 100%,

- b) Perbandingan antar target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Adapun capaian indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 56
Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Realisasi	Target	Capaian
2023	24	24	100%	100%	100%
2022	33	33	100%	100%	100%
2021	15	15	100%	100%	100%

Grafik 12
Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan



Adapun capaian indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir terlihat bahwa capaiannya selalu 100%.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 57
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	100%	100%	100%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan pada

Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 sama dengan dari target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 58
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	100%
2	Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan Agama Mukomuko sama dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.

- e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan ini berhasil dicapai antara lain :

- Bersinergi dengan pemerintah daerah (Tingkat Kecamatan) untuk melaksanakan kegiatan sidang diluar Gedung pengadilan; dan
- Komitmen Bersama dari pengadilan agama mukomuko untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kaum rentan.

- f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 59
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah SDM	Anggaran Sidang Di luar Gedung	Realisasi Anggaran Sidang Di luar Gedung	Capaian Realisasi Anggaran Sidang Di luar Gedung	Capaian Perkara Sidang Di luar Gedung
2023	Hakim 4 Orang PP I Orang JS I Orang	Rp. 35.300.00,-	Rp. 35.300.00,-	100%	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan sama dengan capaian kinerja realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan terjadwal setiap triwulan, dengan dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dengan tujuan mengetahui capaian kinerja setiap triwulan terhadap target yang telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat kendala segera dapat dicarikan solusi terbaik;
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan tujuan program memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan golongan tertentu di Kabupaten Mukomuko dan berdampak pada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peradilan agama; dan
- 3) Kegiatan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui siding diluar Gedung Peradilan Agama yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tujuan membantu masyarakat pencari keadilan golongan tertentu di kabupaten mukomuko.

9. PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum.

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$$

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.

Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mukomuko Mendapatkan anggaran Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan target 300 Orang. Adapun capaian kinerja untuk indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 60
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum), realisasi dapat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 61
Kinerja Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah permohonan layanan posbakum	Jumlah Perkara yang mendapat layanan Posbakum	Persentase Capaian
1	Januari	9	9	100%
2	Februari	42	42	100%
3	Maret	37	37	100%
4	April	25	25	100%
5	Mei	33	33	100%
6	Juni	50	50	100%
7	Juli	24	24	100%
8	Agustus	15	15	100%
9	September	20	20	100%
10	Oktober	45	45	100%
11	November	0	0	100%
12	Desember	0	0	100%
TOTAL		300	300	100%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas Capaian Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023 mencapai 100%,

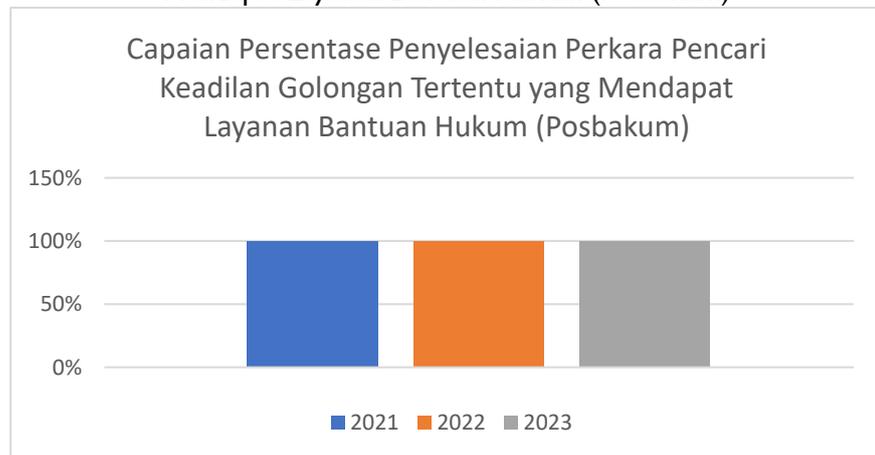
b) Perbandingan antar target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Adapun capaian indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 62
Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah permohonan layanan posbakum	Jumlah Perkara yang mendapat layanan Posbakum	Realisasi	Target	Capaian
2023	300	300	100%	100%	100%
2022	300	300	100%	100%	100%
2021	0	0	0%	0%	0%

Grafik 13
Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



Adapun capaian indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir terlihat bahwa capaiannya selalu 100%.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 63
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	100%	100%	100%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 sama dengan dari target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 64
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Capaian Kinerja
		2023
1	Capaian Kinerja	100%
2	Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	100%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Agama Mukomuko sama dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.

- e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ini berhasil dicapai antara lain :

- Pembinaan dan pengawasan melekat dari pimpinan, yakni ketua dan wakil ketua; dan
- Posbakum memberikan banyak manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat akan memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen gugatan hukum berupa surat gugatan dan surat permohonan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:

Tabel 65
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah SDM	Anggaran Posbakum	Realisasi Anggaran Posbakum	Capaian Realisasi Anggaran Posbakum	Capaian Perkara Posbakum
2023	1 LBH 2 Pengacara 1 Paralegal 2 Staf	Rp. 30.000.00,-	Rp. 30.000.00,-	100%	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sama dengan capaian kinerja realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator Penyelesaian Perkara Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) :

- 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan tujuan program memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan golongan tertentu di Kabupaten Mukomuko dan berdampak pada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peradilan agama; dan
- 2) Kegiatan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tujuan membantu masyarakat pencari keadilan golongan tertentu di

kabupaten mukomuko dan menambah pemahaman masyarakat tentang peradilan agama.

**SASARAN 4 :
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Sasaran Strategis "Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan" merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

- 1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Adapun Capaian Sasaran strategis " Menin Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan" tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 66
Capaian Sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

No.	Indikator	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
I	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	105,26%
Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		100%	100%	105,26%

Grafik 14
Capaian Sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan



Berdasarkan Tabel 66 dan Grafik 14 di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 capaiannya mengalami peningkatan kinerja, yaitu 105,26%.

10. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi.

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (eksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} = 100\%$$

Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga makin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Adapun capaian kinerja untuk indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

- a) Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Tabel 67
Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2023	100%	95%	105,26%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi), realisasi dapat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 105,26%.

Tabel 68
Kinerja Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Putusan yang diajukan eksekusi	Jumlah putusan yang dieksekusi	Persentase Capaian
1	Januari	0	0	100%
2	Februari	0	0	100%
3	Maret	0	0	100%

4	April	0	0	100%
5	Mei	0	0	100%
6	Juni	0	0	100%
7	Juli	0	0	100%
8	Agustus	0	0	100%
9	September	0	0	100%
10	Oktober	0	0	100%
11	November	0	0	100%
12	Desember	0	0	100%
TOTAL		0	0	100%
Rata-rata		0	0	100%

(sumber data : Laporan SIPP Tahun 2023)

Terlihat dari tabel di atas rata-rata perbulan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 0 perkara karena tidak ada yang mengajukan eksekusi terhadap perkara yang sudah diputus.

- b) Perbandingan antar target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

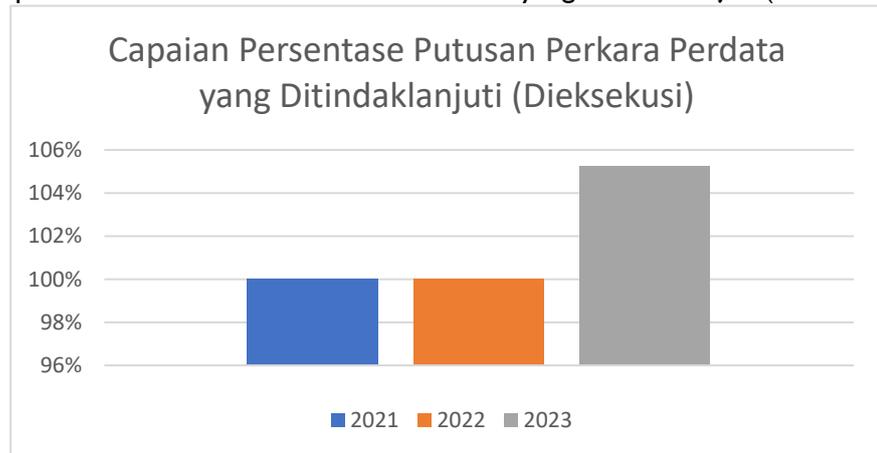
Adapun capaian indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Agama Mukomuko selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 69

Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tahun	Jumlah Putusan yang diajukan eksekusi	Jumlah putusan yang dieksekusi	Realisasi	Target	Capaian
2023	0	0	100%	95%	105,26%
2022	0	0	100%	100%	100%
2021	0	0	100%	100%	100%

Grafik 15
Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)



Adapun capaian indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu 105,26%.

- c) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis

Tabel 70
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Realisasi Kinerja	100%	100%	105,26%
2	Target jangka menengah (Renstra 2020-2024)	83%	95%	96%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2023 lebih tinggi dari target pada perencanaan jangka menengah (Renstra 2020-2024) Pengadilan Agama Mukomuko.

- d) Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 71
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No.	Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Capaian Kinerja
		2023
I	Capaian Kinerja	105,26%

2	Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Tahun 2022	129,64%
---	---	---------

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Agama Mukomuko lebih rendah dari Capaian Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) tahun 2022.

e) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berbagai faktor pendukung Pengadilan Agama Mukomuko yang sangat menunjang dan menjadikan Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) ini berhasil dicapai antara lain :

- Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan Agama Mukomuko Mukomuko karena seluruh hakim telah mengikuti diklat teknis hakim; dan
- Para pihak melaksanakan isi putusan secara sukarela.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Utama dikatakan Efisien apabila capaiannya sama dengan atau lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran. Capaian kinerja Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) di Pengadilan Agama Mukomuko sangat didukung dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut :

Tabel 72
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Jumlah SDM	Jumlah Biaya Panjar permohonan Eksekusi	Realisasi Biaya Eksekusi	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian kinerja Putusan Perkara Perdata Dieksekusi
2023	Hakim 4 Orang PP I Orang JS I Orang	Rp. 0,-	Rp. 0,-	100%	105,26%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Capaian kinerja Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) lebih tinggi capaian kinerja realisasi anggaran sehingga kinerja Indikator masuk kategori efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2023 dilaksanakan beberapa program/kegiatan yang mendukung tercapainya/menyebabkan tidak tercapainya Indikator Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan :

- 1) Program Badilag berupa kegiatan bimbingan teknis secara online yang diikuti Hakim dan Kepaniteraan terkait eksekusi; dan
- 2) Adanya kegiatan diskusi hukum secara online yang diikuti oleh Hakim sehingga menambah wawasan Hakim dalam membuat putusan yang berkualitas.

3.3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Manna yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023, dibiayai oleh Anggaran yang berasal dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI, anggaran DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI dan Biaya Proses Perkara dari Para Pihak.

Program kerja pada Pengadilan Agama Manna telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dimana untuk tingkat banding ada 2 program kerja yang harus dilaksanakan dengan anggaran berasal dari 2 (dua) DIPA yakni DIPA 01 yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen menggunakan anggaran DIPA 01; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan menggunakan anggaran dari DIPA 04.

Adapun penjelasan mendetail terhadap realisasi anggaran dan keterkaitan dengan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 73
 Anggaran dan keterkaitan dengan pencapaian sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Rp. 78.800.000,-	Rp. 78.800.000,-	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
TOTAL		Rp. 78.800.000,-	Rp. 78.800.000,-	100%

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output*.

1) DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

DIPA 01 mencakup anggaran pelaksanaan kegiatan untuk Program :

- a) Program Dukungan Manajemen, kegiatan dalam program ini didukung oleh pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Pengesahan DIPA 01 tertanggal 30 November 2022 dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.401939/2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.942.097.000,- (*tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 74
Kinerja Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi tahun 2023

		Pagu Anggaran	Setelah Revisi	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.027.018.000	Rp. 2.097.026.000	Rp. 2.091.180.042	99,72%	Rp.5.845.958
2.	Belanja Barang	Rp. 826.340.000	Rp. 835.460.000	Rp. 829.718.651	99,80%	Rp. 2.515.370
3.	Belanja Modal	Rp. 15.336.611.000	Rp 15.009.611.000	Rp. 9.221.229.162	99,68%	Rp. 5.788.381.838
Total Realisasi		Rp. 18.189.969.000	Rp17.942.097.000	Rp 12.142.127.855	67,67%	Rp. 5.799.969.145

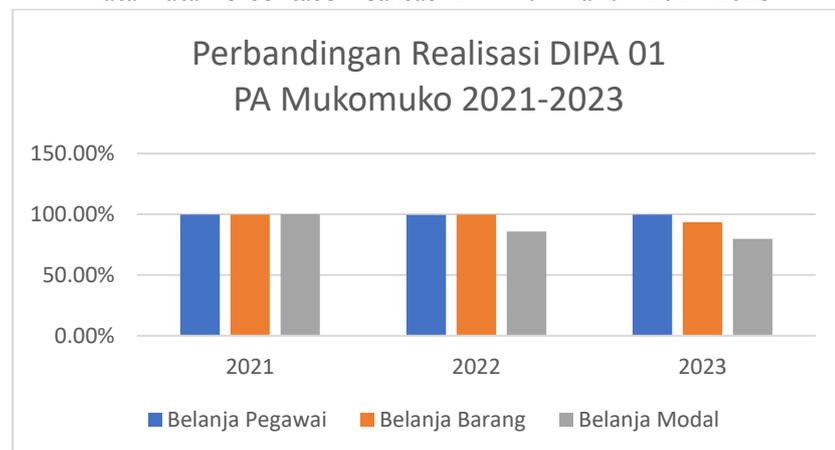
Dalam perjalanan anggaran DIPA 01 BUA MARI mengalami beberapa kali revisi diantaranya karena :

- a) Adanya penambahan anggaran pagu minus belanja pegawai;
- b) Penambahan anggaran belanja Operasional dari eselon I BUA MARI, optimalisasi anggaran;
- c) Revisi antar satuan kerja sewilayah PTA Bengkulu untuk penyelesaian sewa rumah dinas hakim; serta
- d) Penarikan anggaran guna *Refocusing* anggaran dari pusat.

Tabel 75
Perbandingan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2021-2023

No.	Jenis Belanja	Realisasi Anggaran		
		2021	2022	2023
1	Belanja Pegawai	99,65%	99,49%	99,22%
2	Belanja Barang	99,23%	99,43%	93,36%
3	Belanja Modal	99,93%	71,21%	61,43%
Total Rata-Rata Realisasi		99,55%	78,97%	67,67%

Grafik 16
Rata-Rata Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2021-2023



Terlihat pada tabel 75 dan grafik 16 di atas, jika dibandingkan rata-rata persentase capaian realisasi pada tahun 2023 (67,67%) dengan capaian realisasi tahun 2022 (78,97%) menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 11,3%. Penurunan capaian realisasi ini disebabkan oleh serapan dana pada belanja modal pembangunan gedung Pengadilan Agama Mukomuko tidak terserap sepenuhnya.

Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator pada Sasaran Strategis I “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, sebagai berikut :

- a) Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
 - b) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - c) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - d) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Aktivitas kegiatan ini juga mendukung tercapainya indikator sasaran strategis 2 “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, yaitu :
- a) Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
 - b) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

2) **DIPA Eselon 04 Badan Peradilan Agama**

DIPA 04 mencakup anggaran pelaksanaan kegiatan untuk Program Dukungan Manajemen Peradilan Agama.

Pengesahan DIPA 04 tertanggal 30 November 2022 dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.403404/2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 78.800.000,- (*tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*), yang meliputi belanja barang sebagai penunjang Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang terdiri dari kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama di wilayah Pengadilan Agama Mukomuko.

Tabel 76
Realisasi DIPA 04 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA 04 (Dirjen Badilag)				
		Semula	Setelah Revisi	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
I.	Belanja Barang	Rp. 78.800.000	Rp. 78.800.000	Rp. 78.800.000	100%	-
Total Realisasi		Rp. 78.800.000	Rp. 78.800.000	Rp. 78.800.000	100%	-

Anggaran DIPA 04 tahun 2023 digunakan untuk untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan rencana aksi kegiatan/aktivitas sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembebasan Biaya Perkara

Tabel 77
Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023

Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Volume/ target perkara	Capaian realisasi
2023	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	0	20	100%
2022	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	0	20	100%
2021	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	0	6	100%

Dapat dilihat pada tabel 77, capaian realisasi pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022. Adapun anggaran kegiatan ini mendukung tercapainya sasaran strategis 3 Indikator kinerja utama A.

2. Kegiatan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Tabel 78
Laporan Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2023

Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Volume/ target perkara	Capaian realisasi
2023	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	0	30	100%
2022	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	0	30	100%
2021	-	-	-	-	-	-

Adapun anggaran kegiatan ini mendukung tercapainya sasaran strategis 3 Indikator kinerja utama B.

3. Kegiatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

Tabel 79
Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Tahun 2023

Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Volume/target perkara	Capaian realisasi
2023	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	0	30	100%
2022	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	0	30	100%
2021	-	-	-	-	-	-

Adapun anggaran kegiatan ini mendukung tercapainya sasaran strategis 3 Indikator kinerja utama C.

3) Laporan Keuangan Perkara

Adapun kinerja laporan keuangan perkara Pengadilan Agama Mukomuko dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 80
Laporan Keuangan Panjar Perkara Tahun 2023

Tahun	Penerimaan uang panjar perkara (Rp)	Pengeluaran uang panjar perkara (Rp)	Sisa panjar Perkara yang telah dikembalikan (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Capaian realisasi keuangan perkara
2023	Rp327.643.500	Rp322.180.000	Rp52.009.500	Rp5.463.500	96,2%
2022	Rp484.095.000	Rp451.114.000	Rp15.448.500	Rp3.865.000	93,2%
2021	Rp491.904.000	Rp487.899.000	Rp10.473.200	Rp4.005.000	99,2%

Dapat dilihat pada tabel 80, capaian realisasi pada tahun 2023 Lebih besar daripada tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengadilan Agama Mukomuko dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2023. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2023.
- 2) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai yang dipersyaratkan oleh Standar APM.
- 3) Penyelesaian perkara tahun 2023 pada Pengadilan Agama Mukomuko telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara Tahun 2022 sebanyak 1 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 413 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2023 berjumlah 414 perkara, dari jumlah 414 perkara tersebut, telah berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 400 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2023 sebanyak 14 perkara.

4.2. REKOMENDASI

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) ini bertujuan untuk menyajikan data dan informasi sesuai prinsip transparansi seperti yang diharapkan sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

Sementara itu, sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Mahkamah Agung RI dalam mengambil kebijakan, berikut ini saran dari Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II :

- 1) Diperlukan penambahan pegawai baik di bagian Kesekretariatan maupun Kepaniteraan di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengalami banyak hambatan.
- 2) Dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai, baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial, guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik, sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima.

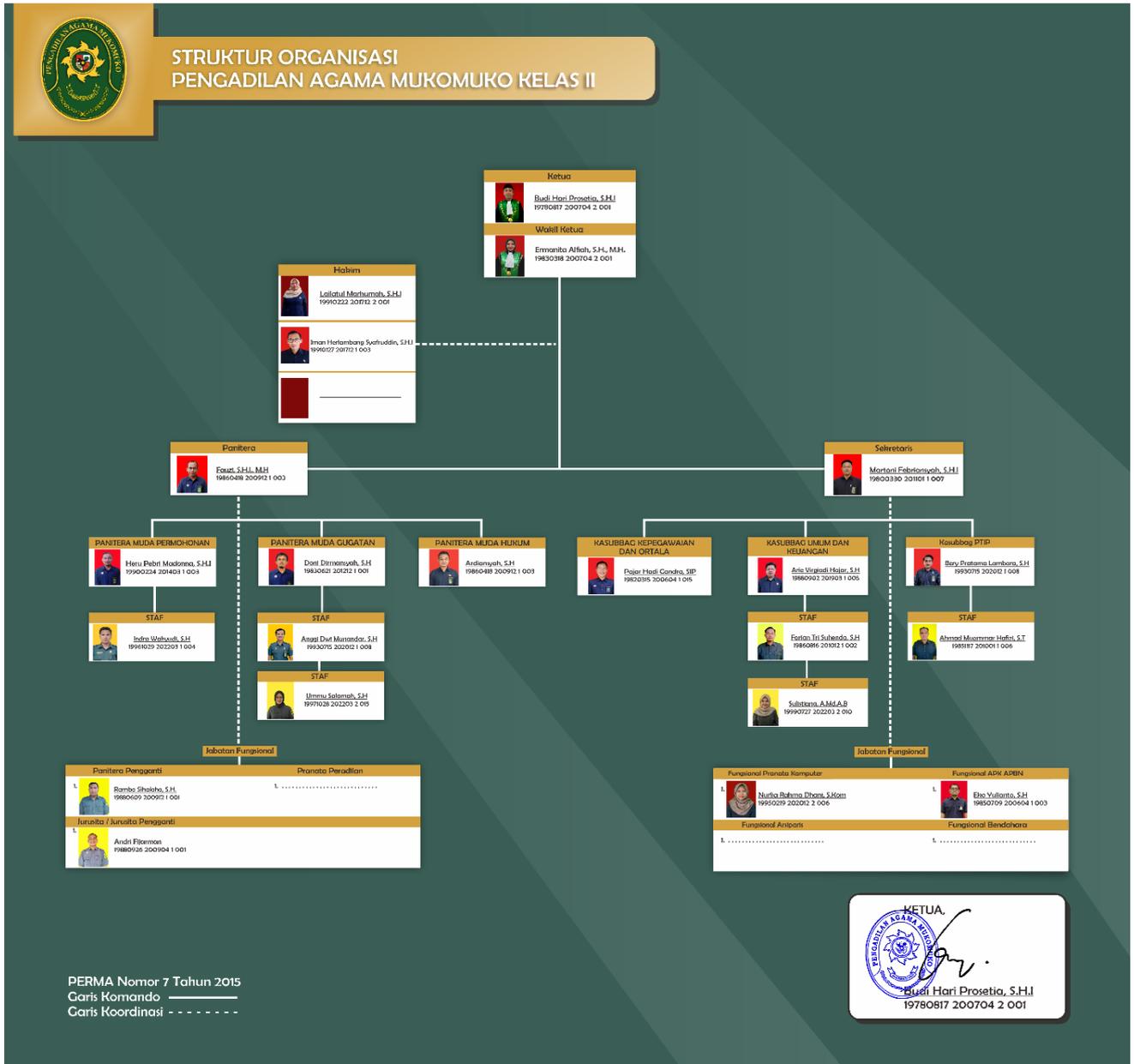


LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

TAHUN 2023





REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair. 	Panitera	

		d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan Putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100% Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> X 100% Jumlah berkas yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> X 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian Prodeo termasuk prodeo murni. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100% Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat guatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> X 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang di inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%

Mukomuko, 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II



Budi Hari Prosetia, S.H.I

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%

Mukomuko, 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II



Budi Hari Prosetia, S.H.I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**



REVISI

Pengadilan Agama Mukomuko
Jalan Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota
Mukomuko, Kab. Mukomuko
Website : www.pa.mukomuko.go.id
Email : pa.mukomuko@gmail.com
Mukomuko - Bengkulu 38765

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hari Prosetia, S.H.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mukomuko, 05 Juli 2023

Pihak Pertama,

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II



Budi Hari Prosetia, S.H.I

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu



Dr. Abd. Hakim, M.H.I.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	60%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%

Kegiatan	Rp.	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	2.862.478.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	15.336.611.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	78.800.000,-

Mukomuko, 05 Juli 2023

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II



Dr. Abd. Hakim, M.H.I.



Budi Hari Prosetia, S.H.I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**



Pengadilan Agama Mukomuko
Jalan Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota
Mukomuko, Kab. Mukomuko
Website : www.pa.mukomuko.go.id
Email : pa.mukomuko@gmail.com
Mukomuko - Bengkulu 38765

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hari Prosetia, S.H.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.

Mukomuko, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Budi Hari Prosetia, S.H.I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	95%

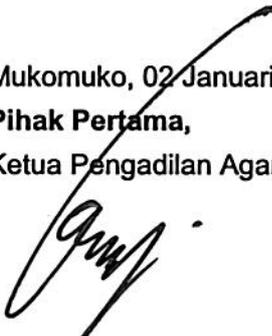
Kegiatan		Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	3.179.518.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	135.990.000,-

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu


Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.

Mukomuko, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II


Budi Hari Prosetia, S.H.I



SERTIFIKAT

NO : W7-A/3115/PP.00.4/12/2022

Diberikan kepada :

Khairul Gusman, S.N.

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Telah Mengikuti

Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
di Hotel Madeline pada tanggal 07 s/d 09 Desember 2022
yang meliputi 20 jam pembelajaran

Bengkulu, 09 Desember 2022

Ketua,



Dr. Abd. Hakim, M.H.I



Materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tahun 2022 :

No.	Materi/Kegiatan	JPL
1.	Materi Kebijakan Umum	2
2.	Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	4
3.	Penyusunan SAKIP Berdasarkan Permenpan 88 tahun 2021 (Akuntabilitas Kinerja)	2
4.	Cascading dan Crosscutting	2
5.	Penyusunan Laporan Kinerja	7
6.	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	3
TOTAL		20

Ketua Panitia,



**Mirawati Saktiana, S.H., M.H.
NIP. 197909291998032002**



SERTIFIKAT

NO : W7-A/3116/PP.00.4/12/2022

Diberikan kepada :

Martoni Febriansyah, S.N.I.

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Telah Mengikuti

Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
di Hotel Madeline pada tanggal 07 s/d 09 Desember 2022
yang meliputi 20 jam pembelajaran

Bengkulu, 09 Desember 2022

Ketpa,



Dr. Abd. Hakim, M.H.I



Materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tahun 2022 :

No.	Materi/Kegiatan	JPL
1.	Materi Kebijakan Umum	2
2.	Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	4
3.	Penyusunan SAKIP Berdasarkan Permenpan 88 tahun 2021 (Akuntabilitas Kinerja)	2
4.	Cascading dan Crosscutting	2
5.	Penyusunan Laporan Kinerja	7
6.	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	3
TOTAL		20

Ketua Panitia,



Mirawati Saktiana, S.H., M.H.

NIP. 197909291998032002



SERTIFIKAT

NO : W7-A/3117/PP.00.4/12/2022

Diberikan kepada :

Fauzi, S.H.I., M.H.

PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Telah Mengikuti

Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
di Hotel Madeline pada tanggal 07 s/d 09 Desember 2022
yang meliputi 20 jam pembelajaran

Bengkulu, 09 Desember 2022


Ketua,
Dr. Abd. Hakim, M.H.I.



Materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tahun 2022 :

No.	Materi/Kegiatan	JPL
1.	Materi Kebijakan Umum	2
2.	Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	4
3.	Penyusunan SAKIP Berdasarkan Permenpan 88 tahun 2021 (Akuntabilitas Kinerja)	2
4.	Cascading dan Crosscutting	2
5.	Penyusunan Laporan Kinerja	7
6.	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	3
TOTAL		20

Ketua Panitia,



Mirawati Saktiana, S.H., M.H.

NIP. 197909291998032002